

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan.

Benny Lubiantara, 2012, *Ekonomi Migas, Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 148.

Salim, Abdullah, 2007, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika,

Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmad Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Percangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, ed. 1, cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group.

Surajiman, 2001, *Perjanjian Bernama*, Jakarta: Pusbakum.

Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya.

R.M. Suryodiningrat, 1978, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito.

M. Yahya Harahap, 1960, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Chayono, 2005, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Gitama Jaya.

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana.
Salim. HS, 2017, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada.

Daniel Johnston, 1994, *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contract*, Oklahoma: Price Waterhouse Publishing.

Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

A. Abdurrahman, 1992, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Ismail Suny dan Rudioro Rochmat, 1968, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

I.G. Rai Widjaja, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan terbatas*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sustantya R. Hadikusuma R.T., dan Sumatoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

C.S.T Kansil dan Christine, 1994, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha

M. Natzir Said, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, Bandung: Alumni.

Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat berharga, Aturan-Aturan Pengangkutan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerja sama Dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Pt. Citra Aditya.

Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: PT. Eresco.

Gatot Suparmono, 1996, *Hukum Perseoran Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan.

CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ridwan Kharandy, 2007, *Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: PT. Eresco.

Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitur setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Yogyakarta: Gama Media Printing.

Man. S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Jakarta: Kencana.

M. Hadi Subhan, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana.

Johanes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet.1, Jakarta: Penerbit Rinec Cipta.

Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media.

Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

B. Skripsi

Mery Marlina R. Silaban, “Kedudukan Kreditur Dalam Perjanjian *Joint Operation* Terkait Utang yang Timbul Akibat Wanprestasi Sebagai Syarat Pengajuan Pemohonan Kepailitan (Analisis Putusan Pailit No: 42/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. Melawan PT. Bali Turtle Islan Development)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

C. Jurnal

Zaukhruffyah Rizqi Addinda dan Hadi, 2018, “Kepailitan *Joint Operation* dan Tanggung jawab para Peserta *Joint Operation*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Tengku Nathan Machmud, 2000, *The Indonesian Production Sharing Contract*, Netherlands: Kluwer Law International, hlm 155.

Lewis B. Hershey, 1943, *The National Archives of The United States (Federal Register)*, United States, vol 8, hlm 13095.

D. Majalah

Pembebanan Cost Recovery dalam Operasi Hulu migas, *Majalah Indonesia Tax Review*, Volume VI/Edisi 08/2007, hlm 4

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4443);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435);